

PASTIKAN JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG

Empat Hari Razia, Puluhan Armada Kena Sanksi

YOGYA (KR) - Dinas Perhubungan Kota Yogya bersama jajaran kepolisian dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas (BPTD) DIY intensif melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dan penumpang yang masuk wilayah Yogya. Selama empat hari razia, terdapat puluhan armada yang dikenai sanksi lantaran tidak tertib administrasi maupun kelengkapan armada.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogya Ariyanto Agus Cahyono, menjelaskan razia atau operasi gabungan bersama aparat kepolisian tahap awal sudah dilakukan pada 24-27 Juni 2024 di beberapa titik pintu masuk wilayah Kota Yogya. Dalam operasi gabungan itu terjaring puluhan angkutan barang dan orang seperti bus pariwisata yang habis masa uji kelaikan kendaraan atau KIR. "Tujuannya agar semua bisa dipastikan bahwa kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Yogya, khususnya bus pariwisata dalam keadaan laik jalan," katanya, Jumat (28/6).

Pemeriksaan kelaikan

angkutan orang dan barang di antaranya terkait surat-surat kendaraan, kartu laik jalan, surat KIR serta izin pariwisata untuk bus pariwisata. Di samping itu kelengkapan lainnya seperti pemecah kaca dan alat pemadam api ringan. Dinas Perhubungan Kota Yogya mencatat selama empat hari operasi gabungan angkutan barang dan orang di beberapa ruas jalan, petugas memeriksa sekitar 465 kendaraan angkutan sepeda motor. Dari jumlah itu sebanyak 59 angkutan ditilang Dinas Perhubungan Kota Yogya terkait uji KIR dan 114 kendaraan ditilang Polresta Yogya. Selain itu ada lima armada bus pariwisata yang ditilang karena

uji KIR mati dari operasi gabungan di Jalan Bantul dan Jalan Hos Cokroaminoto. Dinas Perhubungan Kota Yogya kemudian memberikan sanksi tilang untuk diproses membayar denda di pengadilan.

Ariyanto mengungkapkan, dalam operasi gabungan itu pihak Polresta Yogya juga menilang angkutan penumpang dan barang serta sepeda motor terkait Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), knalpot brong serta pengendara tanpa helm. "Kita sanksi tilang KIR dari Dinas Perhubungan dan bayar denda tilang di pengadilan. Mereka beralasan tidak mengurus KIR karena sibuk dan lupa,"

ujarnya.

Menurutnya operasi penegakan hukum angkutan itu sesuai instruksi Dirjen Perhubungan mengingat cukup banyak kejadian bus pariwisata yang izinnya mati dan tidak laik jalan namun tetap dipaksakan untuk beroperasi. Oleh sebab itu operasi gabungan penegakan hukum angkutan akan terus diintensifkan selama masa liburan ini. Pihaknya mengimbau para pemilik angkutan orang dan barang untuk melakukan uji KIR secara rutin, apalagi kini layanan itu tidak dipungut. "Padahal sudah dipastikan seluruh Indonesia uji KIR ini gratis, seharusnya untuk keselamatan harus dijalani. Di Yogya tidak ada denda juga dan prosesnya mudah lewat online JSS. Ini demi keselamatan bersama," tegas Ari.

Sementara itu Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli



KR-Istimewa

Petugas Dinas Perhubungan Kota Yogya menunjukkan kelengkapan administrasi bus pariwisata yang mampu dipenuhi.

(Turjawali) Satlantas Polresta Yogya Iptu Jayeng Hadi Harjasa, menyampaikan sinergitas Polresta dengan Dinas Perhubungan Kota Yogya melalui operasi gabungan sudah rutin di-

lakukan. Dirinya mengingatkan masyarakat agar tertib dalam surat-surat kendaraan dan berlalu lintas demi keselamatan dan tidak mengalami kendala misalnya apabila terkait de-

ngan Jasa Raharja. "Tujuannya untuk menekan laka lantas. KIR mati, STNK mati, SIM tidak punya ya kita sentuh supaya tidak ada kata pembiasaan," tegasnya. (Dhi)-f

BANYAK PNS MEMASUKI MASA PENSIUN

Pemda DIY Kekurangan Pegawai Berstatus ASN

YOGYA (KR) - Kekurangan pegawai yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) sampai saat ini masih menjadi persoalan serius yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk DIY. Sebetulnya kondisi tersebut bukan hal baru, karena kekurangan guru itu sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Salah satunya dikarenakan banyak ASN yang sudah memasuki masa pensiun.

Kekurangan ASN tersebut berkisar antara 30 sampai 40 persen. Hal itu dikarenakan jumlah pegawai yang pensiun dan yang direkrut timpang serta adanya kebijakan moratorium rekrutmen CPNS.

"Rata-rata ASN yang pensiun di lingkungan Pemda DIY berkisar 500-an lebih setiap tahunnya. Kekosongan jabatan itu nantinya akan diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS yang bakal direkrut pada tahun 2025 mendatang. Adapun untuk jumlah pastinya kami masih menunggu formasi yang disetujui oleh MenpanRB. Jadi formasi kami usulkan dan ditetapkan MenpanRB sekaligus jadwal



KR-Riyana Ekawati

Amin Purwani rekrutmenya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani usai penyerahan SK pensiun ASN Pemda DIY periode Juli sampai Desember 2024 di Bangsal Kematihan Jumat (28/6).

Penyerahan SK pensiun itu diikuti oleh 260 ASN dari 28 instansi di Pemda DIY. Dua di antaranya merupakan kepala dinas yakni Kepala Kesbangpol DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso yang akan pensiun pada 1 Agustus nanti serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongko yang akan pensiun pada 1 Desember mendatang.

Menurut Amin, saat ini Pemda DIY masih keku-

rangan P3K dan CPNS. Apabila dirata-rata kekurangan itu mencapai angka 30 sampai 40 persen dari kebutuhan pegawai. Namun, kondisi itu berbeda di setiap OPD, ada yang terisi 80 persen dan ada juga yang kurang dari jumlah itu lantaran kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X menyatakan, masa pensiun harus disambut dengan 'sumeleh' dan rasa penuh syukur. Sikap sumeleh disini menjadi bekal yang sangat penting dan bermanfaat untuk memasuki masa pengabdian kedua dengan memberikan peran yang lebih bermakna bagi keluarga dan masyarakat.

Komentar serupa diungkapkan oleh Kepala Kesbangpol DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso. Menurutnya, masa pensiun bukanlah garis finish, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan. Untuk itu pikiran harus terus diarahkan dan diberdayakan karena pengabdian tidak lantas berhenti hanya karena memasuki purna tugas di lingkungan birokrasi. (Ria)-f

WUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Sugeng Ingatkan Transparansi Keuangan dan Pekerjaan

YOGYA (KR) - Sistem pengendalian internal di lingkungan Pemkot Yogya dinilai sangat baik lantaran berada di level tiga. Meski demikian, Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto tetap mengingatkan agar transparansi keuangan dan pekerjaan mampu terus dijaga sejak dari perencanaan hingga realisasi.

Sugeng mengaku, dirinya akan mendukung penuh jajaran Inspektori Kota Yogya dalam menjalankan fungsinya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, untuk mewujudkan good and clean governance dibutuhkan kerja sama seluruh jajaran pimpinan instansi pemerintah dalam pengendalian kegiatan. "Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban

secara tertib, terkendali, efektif dan efisien," ujarnya, Jumat (28/6).

Saat ini, lanjutnya, setiap unsur pemerintahan dituntut memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, baik dari segi keuangan maupun dari realisasi fisik hasil pekerjaannya. "Karena dalam tata kelola organisasi pemerintahan yang baik, semua kegiatan seharusnya terukur. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut orang nomor satu di Kota Yogya ini juga sangat mengapresiasi bahwa kapabilitas APIP Kota Yogya sudah berada di level 3.

"Ini artinya Inspektori sebagai APIP telah melaksanakan fungsi quality assurance berupa audit kinerja dan audit operasional. Di samping

itu juga telah melakukan fungsi consulting berupa klinik konsultasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada setiap perangkat daerah," bebernya.

Sementara Inspektur Kota Yogya Fitri Paulina Andriani, mengaku setiap tahun pihaknya selalu menyelenggarakan gelar pengawasan daerah yang melibatkan seluruh pejabat teras di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Yogya. Berbagai temuan dan persoalan selama setahun sebelumnya dikupas bersama berikut rekomendasi yang telah diberikan. Hal itu sebagai upaya dalam mewujudkan good and clean governance atau tata pemerintahan yang bersih.

Fitri Paulina mengaku, gelar pengawasan daerah bahkan juga menjadi salah satu media komunikasi dan eval-

uasi yang efektif atas hasil pelaksanaan pembinaan serta pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilakukan. "Ini juga untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan," ungkapnya.

Dirinya berharap dengan kegiatan tersebut setiap perangkat daerah dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi Inspektori selaku aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjalankan perannya. Yakni sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Sehingga setiap hal yang mengarah pada potensi terjadinya pelanggaran dapat dengan cepat dicegah atau diantisipasi. (Dhi)-f

Gelar Workshop Tentang Kurikulum UJB Hadirkan Narasumber dari Malaysia



KR-Devid Permana

Prof Dr Noor Ismawati Jaafar menyampaikan paparan dalam workshop.

YOGYA (KR) - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Fakultas Teknik (FT) Universitas Janabadra mengadakan workshop dengan judul 'Benchmarking in Curriculum and Course Planning Workshop' di Ruang Executive, Kampus Pusat UJB, Kamis (27/6). Workshop diikuti pimpinan universitas, dekan, kaprodi dan para dosen di lingkungan Universitas Janabadra.

Workshop menghadirkan narasumber Prof Dr Noor Ismawati Jaafar dari Universitas Malaysia, Malaysia dipandu moderator Andreas Ronald Setianan BBus MComm. Hadir pula Dr Farzana Parveen Tajudeen selaku Senior Lecturer dari Universitas Malaysia.

Rektor UJB Dr Risdiyanto menuturkan, lulusan perguruan tinggi saat ini meng-

hadapi tuntutan yang tidak mudah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peta persaingan di pasar tenaga kerja secara cepat dan intensif. "Workshop ini dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan lulusan UJB," kata Rektor di sela kegiatan.

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis UJB Handoko Arwi Hasthoro SEMSi mengatakan, University Malaysia merupakan perguruan tinggi ternama dari Malaysia yang saat ini menempati ranking 60 dunia berdasar QS World University Rankings tahun 2024. Sehingga, Universitas Janabadra melakukan workshop dalam rangka benchmarking (studi banding) dengan Universitas Malaysia.

Menurut Handoko, studi

banding yang dilakukan adalah dalam perancangan rencana pembelajaran semester (RPS) dan kurikulum. "Pengembangan RPS dan kurikulum diperlukan untuk mengadaptasi mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI) saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Handoko, Universitas Janabadra, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik ingin mendapatkan masukan dan pencerahan agar RPS dan kurikulum dapat disusun secara benar seperti apa yang dilakukan oleh Universitas Malaysia. "Target yang ingin dicapai adalah RPS dan kurikulum yang mampu menciptakan kualitas lulusan sesuai kebutuhan DUDI," pungkasnya.

Sementara itu dalam paparannya, Prof Dr Noor Ismawati Jaafar menyarankan agar dalam penyusunan kurikulum dan RPS disusun dalam format yang berstandar internasional. Selain itu penyusunan RPS dan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan dari DUDI. Dengan begitu lulusan bisa beradaptasi dengan DUDI dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. (Dev)-f

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PPDB SISTEM ZONASI HARUS BERKEADILAN

Akomodir Warga Kota Yogya, Pertahankan Kualitas Pendidikan

YOGYA (KR) - Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online atau real time online (RTO) berbasis zonasi di wilayah Kota Yogya sudah mulai bergulir. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) memiliki tanggungjawab untuk mengakomodir warga Kota Yogya sekaligus mempertahankan kualitas pendidikan.

Ketua DPRD Kota Yogya H Danang Rudiymoko, menilai asas utama dalam proses PPDB zonasi ialah harus berkeadilan. Oleh karena itu pihaknya juga sangat terbuka atas setiap masukan dan kritikan guna perbaikan penyelenggaraan. "Tentu saja polemik itu selalu ada. Tetapi Disdikpora juga terus membuat aturan agar semua berjalan lancar dan prioritasnya adalah masyarakat Kota Yogya sekaligus kualitas pendidikan juga mampu dipertahankan," katanya.

Menurutnya dengan mempertimbangan teritorial dan sebaran sekolah negeri di Kota Yogya maka untuk menerapkan zonasi wilayah secara utuh akan sulit diterapkan. Sehingga dibuat formulasi dengan membagi dalam berbagai zona berikut kuotanya guna mengedepankan asas berkeadilan. Masing-masing zona radius 15 persen, zona daerah 44 persen, zona afirmasi disabilitas lima persen dan warga kurang mampu 11 persen, zona

H Danang Rudiymoko
Ketua DPRD Kota Yogya



KR-Ardhi Wahdan

bitbit unggul sekolah dakam kota 10 persen, zona mutasi orangtua dan kemalahatan guru lima persen, dan zona prestasi luar daerah 10 persen.

Danang mengungkapkan kuota tiap zona juga selalu dievaluasi bahkan dilakukan pengetahuan agar memberikan jaminan bagi siswa penduduk Kota Yogya. Begitu pula aturan teknis dalam penyeleksian selalu diperbaiki. Sebagai contoh mulai tahun ini untuk zona radius hanya mengakomodir siswa Kota Yogya

yang berdomisili dengan orangtua maupun kakek atau neneknya sehingga famili lain dalam kartu keluarga sudah tidak dimasukkan dalam zonasi radius. Begitu juga sistem seleksi untuk zonasi daerah tidak sebatas memperhatikan nilai ASPD melainkan gabungan dengan nilai rapor selama lima semester terakhir. Hal ini untuk memberikan apresiasi atas standar penilaian dari tiap sekolah.

"Kami selalu mengawasi agar pelaksanaannya betul-betul obyektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Disdikpora juga tetap memberikan peluang bagi siswa luar kota untuk bisa mengikuti pendidikan di Kota Yogya. Dan Kota Yogya juga punya beban untuk mempertahankan mutu pendidikan. Tetapi bagi yang belum bisa masuk ke sekolah negeri pun tidak perlu khawatir, masih ada sekolah swasta yang kuotanya jauh lebih banyak dan ada jaminan pendidikan daerah (JPD) yang bisa diakses," papar Danang.

Meski mutu pendidikan di sekolah harus dipertahankan namun orangtua tetap memiliki tanggungjawab dalam mendidik anak. Porsi sekolah lebih pada pengayaan referensi dalam memecahkan persoalan, sedangkan lingkungan rumah juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pendidikan. (Dhi)-f